SHUTTLE DIPLOMACY INDONESIA TERHADAP MYANMAR PASCA KUDETA MILITER TAHUN 2021

(Skripsi)

Oleh

ANADAA NABILAH FIRDAUS
NPM 1716071017

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

SHUTTLE DIPLOMACY INDONESIA TERHADAP MYANMAR PASCA KUDETA MILITER TAHUN 2021

Oleh
ANADAA NABILAH FIRDAUS

Pada awal tahun 2021 lalu, yaitu tanggal 1 Februari 2021, telah terjadi kudeta militer di Myanmar. Kudeta tersebut dilakukan oleh Junta Militer karena adanya sengketa pemilu yang diadakan pada bulan November 2020 antara *National League for Democracy Party* (NLDP) dan *Union Solidarity and Development Party* (USDP). Kudeta militer tersebut telah memicu protes keras dan kecaman global. Indonesia menunjukan keprihatinan atas apa yang terjadi pada Myanmar. Indonesia terus melakukan upayanya dengan berkontribusi dalam menemukan solusi untuk Myanmar dengan melakukan *shuttle diplomacy.* Hal yang disampaikan dalam diplomasi ini antara lain ialah terkait penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan kepada semua pihak di Myanmar, transisi demokrasi secara inklusif, rekonsiliasi nasional antara Junta Militer dengan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, dan kewajiban menghormati serta menaati prinsip-prinsip yang ada dalam ASEAN *Charter* dan *Five Points Consensus*.

Penelitian ini menggunakan teori diplomasi dan *shuttle diplomacy*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan tahap kondensasi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Dan sumber data yang peneliti gunakan ialah data sekunder dengan menggunakan buku, jurnal, perjanjian internasional, makalah, artikel, dan *website* sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi terkait kudeta militer di Myanmar tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan untuk Myanmar masih belum mencapai penyelesaian masalah karena pihak militer masih enggan menaati *Five Point Consensus*. Meskipun demikian Indonesia tidak menyerah dan terus menjembatani dialog dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai. Karena fokus utama dalam kejadian ini ialah korban atau rakyat Myanmar. Jika kekerasan tidak dihentikan maka perdamaian tidak akan pernah tercapai.

Kata kunci : kudeta militer, Indonesia, Myanmar, *shuttle diplomacy*.

ABSTRACT

INDONESIAN SHUTTLE DIPLOMACY TO MYANMAR POST MILITARY COUP IN 2021

By
ANADAA NABILAH FIRDAUS

At the 1st of February, 2021, there was a military coup in Myanmar. The coup was carried out by the Military Junta because of a dispute over the elections held in November 2020 between the National League for Democracy Party (NLDP) and the Union Solidarity and Development Party (USDP). The military coup has sparked violent protests and global condemnation. Indonesia shows concern about what is happening to Myanmar. Indonesia continues to make efforts by contributing to finding a solution for Myanmar by carrying out shuttle diplomacy. The messages that will be sent in this diplomacy include cessation of violence, humanitarian assistance to all parties in Myanmar, inclusive democratic transition, national reconciliation between the Military Junta and the National League for Democracy (NLD) led by Aung San Suu Kyi, and the obligation to respect and comply with the principles contained in the ASEAN Charter and the Five Points Consensus. This research uses the theory of diplomacy and shuttle diplomacy. The analysis technique used in this research is a qualitative data analysis technique with data condensation, data presentation, conclusion and verification stages. And the data sources that researchers use are secondary data using books, journals, international agreements, papers, articles and websites as data sources to collect information related to the military coup in Myanmar in 2021. Based on the research results, it can be concluded that the shuttle diplomacy that Indonesia has carried out for Myanmar has not reached a solution to the problem because the military is still reluctant to comply with the Five Point Consensus. However, Indonesia did not give up and continued to bridge dialogue and ensure that humanitarian aid arrived. Because the main focus in this incident is the victims or the people of Myanmar. If violence is not stopped then peace will never be achieved.

Keywords: Indonesia, military coup, Myanmar, shuttle diplomacy.

SHUTTLE DIPLOMACY INDONESIA TERHADAP MYANMAR PASCA KUDETA MILITER TAHUN 2021

Oleh
ANADAA NABILAH FIRDAUS

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: ***SHUTTLE DIPLOMACY*** **INDONESIA TERHADAP MYANMAR PASCA KUDETA MILITER TAHUN 2021**
Nama Mahasiswa	: Anadaa Nabilah Firdaus
Nomor Pokok Mahasiswa	: **1716071017**
Program Studi	: **Hubungan Internasional**
Fakultas	: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041000

Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP. 199105022020122020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Simon Sumanjoyo, S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**

Sekertaris : **Astiwi Inayah, S.IP., M.A.**

Penguji : **Gita Karisma, S.IP., M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196107081987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Maret 2024**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

Anadaa Nabilah Firdaus

NPM 1716071017

RIWAYAT HIDUP

Anadaa Nabilah Firdaus lahir pada tanggal 8 Februari 1999 di Dayamurni. Putri dari pasangan bapak Amirudin dan ibu Rini Budi Astuti merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Bertempat tinggal di Dusun Ujung Batu Desa Bandar Sakti Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara, Provinsi Lampung. Pendidikan yang pernah di tempuh ; Sekolah Dasar di SD Negeri Bandar Sakti pada tahun 2006 kemudian lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tumijajar dan lulus pada tahun 2014, meneruskan Pendidikan ke SMA Negeri 1 Tumijajar dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi negeri Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2017, melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama masa perkuliahan, penulis pernah mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa SPEC Unila dan ESo Unila sebagai anggota. Selain itu, penulis juga telah melaksanakan Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "*Shuttle Diplomacy* Indonesia terhadap Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021".

MOTTO

- Sabar, satu persatu. Selalu ada cara untuk menemukan solusi dari semua masalah. -

(Anjas)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam serta penuh kasih sayang, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak Amirudin dan Ibu Rini Budi Astuti
Berkat doa, harapan, kepercayaan, dukungan serta kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis, penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Saya Sendiri
Terimakasih, karena terus mau percaya bahwa saya mampu menyelesaikan tulisan ini, mampu mewujudkan impian saya. Walau dengan berbagai situasi yang seringkali tidak selalu baik, saya terus berjalan kedepan.

Bapak dan Ibu Dosen Hubungan Internasional
Terimakasih atas waktu, ilmu, dan inspirasi yang sangat berharga yang diberikan kepada penulis.

Dan untuk Almamaterku Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "***Shuttle Diplomacy* Indonesia terhadap Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021**". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Lampung.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidaklah mungkin selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta kritik dan saran dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis serta Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia;
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
3. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
4. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
5. Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang senantiasa meluangkan waktu dan selalu memberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi dan pengalaman kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi;
6. Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan ilmu dan waktu serta tidak pernah bosan memberikan arahan, bimbingan, nasihat, motivasi dan pengalaman kepada penulis dalam proses bimbingan untuk menyelesaikan skripsi;

7. Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan ilmu dan meluangkan waktu serta memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen Jurusan Hubungan Internasional beserta staf jurusan atas bekal ilmu, pelajaran, dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis baik dalam bidang akademik maupun non-akademik;
9. Bapak dan Mamakku tersayang, terimakasih banyak atas doa, dukungan, kepercayaan yang selalu diberikan kepada Adaa, sehingga Adaa mampu untuk terus melangkah dan mencapai impian Adaa yaitu menyelesaikan studi di Universitas Lampung;
10. Mbah Kakung dan Mbah Oyot, terimakasih banyak karena selalu mendoakan dan menyemangati Adaa setiap waktu. Berkat doa dan semangat dari Mbah Kakung dan Mbah Oyot Adaa bisa sampai titik ini;
11. Galih Mahardika Firdaus, selaku adik penulis yang selalu memberi semangat dan menghibur penulis;
12. Encik, Uu, Tata, Bibi Wiwin, dan Bibi Yayat, selaku tante penulis yang telah membantu, memberi dukungan, nasihat, semangat dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini sampai akhir;
13. Keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan;
14. Ais Firadilah, sahabat penulis yang selalu menyemangati dan menghibur serta selalu sabar menemani penulis sejak di bangku SMA hingga sekarang;
15. Anjas Tri Saputra, terimakasih banyak atas bantuan, dukungan, perhatian, kasih sayang, kesabaran, motivasi, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat terus melangkah ke depan dan menyelesaikan tulisan ini. Serta percaya bahwa selalu ada solusi untuk setiap masalah;
16. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung angkatan 2017 yang saling memberikan bantuan, arahan, motivasi dan semangat untuk menyelesaikan studi.

17. Untuk diri saya sendiri, terimakasih banyak karena terus percaya bahwa penulis mampu untuk menyelesaikan tulisan ini. Terimakasih banyak atas langkah yang tidak pernah berhenti dan mundur. Terimakasih atas komitmen kuat untuk menyelesaikan tulisan ini. Terimakasih banyak sudah bertahan dan sampai di titik ini.

Bandarlampung, 21 Maret 2024

Penulis

Anadaa Nabilah Firdaus

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
ABSTRACT ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**
MENGESAHKAN ..... **vi**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
MOTTO ..... **ix**
PERSEMBAHAN ..... **x**
SANWACANA ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**
DAFTAR SINGKATAN ..... **xviii**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Kegunaan Penelitian 5

II. TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Penelitian Terdahulu 6
2.2 Landasan Teori 11
2.2.1 Teori Diplomasi 11
2.2.2 *Shuttle Diplomacy* 15
2.3 Kerangka Pemikiran 19

III. METODOLOGI PENELITIAN **21**
3.1 Jenis Penelitian 21
3.2 Fokus Penelitian 21
3.3 Sumber Data Penelitian 22
3.4 Teknik Pengumpulan Data 22
3.5 Teknik Analisis Data 22

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN **24**
4.1 Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021-2023 24
4.2 Dinamika Hubungan Diplomatik Indonesia dan Myanmar 30

4.3 *Shuttle Diplomacy* Indonesia terhadap Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021 hingga Tahun 2023 35
4.3.1 *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke Myanmar dan Pemangku Kepentingan Myanmar Tahun 2021 hingga Tahun 2023 35
4.3.1.1 *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke Myanmar 36
4.3.1.2 Diplomasi Indonesia dengan Pemangku Kepentingan Myanmar..... 39
4.3.2 *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke Negara ASEAN dan Mitra ASEAN Tahun 2021 hingga Tahun 2023 43
4.3.2.1 Putaran Pertama : *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke Brunei Darussalam 43
4.3.2.2 Putaran Pertama : *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke Singapura..... 44
4.3.2.3 Putaran Pertama : *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke Thailand..... 45
4.3.2.4 Putaran Kedua : *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT)..... 46
4.3.2.5 Putaran Kedua : *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke Jepang..... 47
4.3.3 Hasil shuttle diplomacy Indonesia : Five Point Consensus..... 51
4.3.4 Bantuan Kemanusiaan untuk rakyat Myanmar lewat AHA Centre 54

V. KESIMPULAN DAN SARAN..... 58
5.1 Kesimpulan 58
5.2 Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA..... 62

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Perbandingan Penelitian terdahulu	9
Tabel 4.1	Hasil *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke Myanmar dan Pemangku Kepentingan Myanmar	41
Tabel 4.2	Hasil *Shuttle Diplomacy* Indonesia ke negara ASEAN dan mitra ASEAN	49

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Model Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4.1	Transisi Politik Myanmar : 2008 - 2023	25

DAFTAR SINGKATAN

ALM	:	*ASEAN Leaders Meeting*
AFV	:	*Armoured Fighting Vehicle*
AHA Centre	:	*The* ASEAN *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management*
ARC	:	*Asian Relation Conference*
ARF	:	*ASEAN Regional Forum*
ASEAN	:	*Association of South East Asian Nation*
ASN	:	Nomor Sistem Autonomous
AU	:	Angkatan Udara
AURI	:	Angkatan Udara Republik Indonesia
BDF	:	*Bali Democracy Forum*
BPS	:	Badan Pusat Statistik
COVID-19	:	*Corona Virus Disease* 2019
CSOs	:	*Central Statistical Organizations*
DK	:	Dewan Keamanan
EAOs	:	*Ethnic Armed Organizations*
EROs	:	*Ethnic Resistance Organizations*
EU	:	*European Union*
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HRW	:	*Human Rights Watch*
ICRC	:	*International Committee of The Red Cross*
IDPs	:	*Internally Displaced Persons*
IGO	:	*International Organization*
INTERFET	:	*International Force for East Timor*
IOM	:	*International Organization for Migration*
IPD	:	*Institute for Peace and Democracy*

IPTC	:	*Indonesian Products, Tourism and Culture Exhibition*
ISP	:	*Internet Service Provider*
KAA	:	Konferensi Asia-Afrika
KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KTT	:	Konferensi Tingkat Tinggi
MDRI	:	*Myanmar Development and Research Institute*
MRCS	:	*Myanmar Red Cross Society*
NLDP	:	*National League for Democracy Party*
NUG	:	*National Unity Government*
PKPU	:	Pos Keadilan Peduli Umat
PBB	:	Perserikatan Bangsa Bangsa
RRT	:	Republik Rakyat Tiongkok
SAC	:	*The State Administration Council*
SLORC	:	*State Law and Order Restoration Council*
TV	:	*Television*
UMEHL	:	*The Union of Myanmar Economic Holding Limited*
UN	:	*United Nations*
UNHCR	:	*United Nations High Commissioner for Refugees*
USDP	:	*Union Solidarity and Development Party*
UU	:	Undang-undang
VPN	:	*Virtual Private Network*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan internasional, mempelajari hubungan politik, ekonomi dan sosial antar negara adalah fokus teori dan praktik dalam hubungan internasional untuk memajukan kepentingan nasional. Sebagai contoh, pada Konferensi Hubungan Asia tahun 1947 di New Delhi, baik Indonesia maupun Myanmar, yang telah menjalin hubungan bilateral sejak tahun 1947, menyerukan penarikan segera pasukan Belanda dari Indonesia dan mengutuk tindakan militer agresif mereka (Sundhaussen, 1995). Namun, hubungan antara kedua negara baru dimulai secara resmi pada tahun 1949, ketika kedua negara mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia dari pemerintahan kolonial Inggris. Misalnya saja, Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap pergolakan politik dan revolusi militer yang melanda Myanmar karena kedekatan mereka satu sama lain di wilayah tersebut. Karena hal tersebut, Indonesia selalu terlibat dalam upaya mengakhiri perang saudara di Myanmar. Hal ini tercermin dari dinamika interaksi kedua negara. Beberapa pendekatan untuk mencapai tujuan ini termasuk menarik dukungan asing terhadap Myanmar dan mengupayakan rekonsiliasi nasional dan demokratisasi.

Indonesia adalah negara yang memiliki konsep politik luar negeri bebas aktif, dimana hal ini menjadikan Indonesia bebas bersikap terhadap permasalahan internasional dengan tidak memihak kepada salah satu kekuatan dunia dan aktif dalam membantu terwujudnya perdamaian dunia. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi, “Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Hal ini menjadikan Indonesia memiliki citra dan identitas sebagai *problem solver* dan *peace maker*. Indonesia adalah salah satu negara yang menunjukkan keprihatinan atas apa yang terjadi pada Myanmar. Selain

kedekataan hubungan Indonesia dan Myanmar, sejarah keberhasilan Indonesia dalam transisi demokratis dari kepemimpinan diktator militer pada tahun 1998 dan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas perdamaian bagi kawasan Asia Tenggara, Indonesia terus melakukan upayanya dengan berkontribusi dalam menemukan solusi untuk Myanmar. Solusi yang selalu Indonesia upayakan ialah dengan terus berusaha mengajak Junta militer berdialog. Indonesia melakukan berbagai diplomasi dalam upayanya untuk bernegosiasi. Diplomasi tersebut ialah *shuttle diplomacy*. Shuttle diplomacy atau diplomasi ulang-alik yang dilakukan oleh pihak ketiga atau penengah yang berfungsi sebagai pihak yang menyampaikan informasi secara bolak-balik dan sebagai pemberi saran penyelesaian masalah (Shedrach, 2019). *Shuttle diplomacy* gencar dilakukan Indonesia dari waktu ke waktu. Tercatat Indonesia telah melakukan diplomasi menanggapi isu kudeta militer sejak 23 Februari 2021 hingga 7 Juli 2023. Hal yang disampaikan dalam diplomasi ini antara lain ialah terkait penghentian kekerasan, bantuan kemanusiaan kepada semua pihak di Myanmar, dan dialog politik kepada semua pihak pemerintah. Semua upaya yang Indonesia lakukan sesuai dengan *Five Points Consensus*. *Five Points Consensus* adalah kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan pemimpin ASEAN pada 24 April 2021. Kesepakatan tersebut berisi poin-poin yang berkaitan dengan penghentian kekerasan di Myanmar dan solusi terbaik untuk rakyat Myanmar (ASEAN, 2021).

Junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan Myanmar pada awal tahun 2021 lalu, yaitu tanggal 1 Februari 2021. Kudeta tersebut terjadi karena adanya sengketa pemilu yang diadakan pada bulan November 2020 antara *National League for Democracy Party* (NLDP) dan *Union Solidarity and Development Party* (USDP) (Martin, Dolven, & Smith, 2021). Pemilu tersebut dimenangkan oleh partai NLDP yang dipimpin oleh San Suu Kyi dimana ia memperoleh 396 kursi parlemen (Martin, Dolven, & Smith, 2021). Sedangkan faksi militer atau USDP hanya mendapatkan 33 kursi parlemen. Hasil pemilu tersebut tidak diterima pihak militer dan mereka menuduh adanya kecurangan. USDP atau faksi militer menuduh pihak San Suu Kyi telah melakukan penipuan dan kecurangan meskipun Komisi

Pemilihan Umum (KPU) sudah menyangkal tuduhan tersebut karena tidak adanya bukti. Pada 1 Februari Junta militer menggulingkan Aung San Suu Kyi dan juga menuduhnya telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atas kepemilikan enam *walkie talkie* yang diimpor secara ilegal (CNN, 2021). Tuduhan-tuduhan tersebut menjadi sebuah bukti bahwa Junta militer ingin mengambil kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara dan hal tersebut melanggar aturan hukum dan proses demokrasi di Myanmar. Kejadian ini adalah bentuk nyata kuatnya pengaruh pihak militer yang tidak ingin kekuasaannya diambil oleh pihak lain. Sudah sangat jelas bahwa pihak militer telah merusak proses demokrasi di Myanmar dan melanggar hak-hak sipil.

Kudeta militer terhadap pemerintah sipil telah memicu protes keras dan kecaman global. Kecaman global diberikan oleh *Human Rights Watch* (HRW), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken, Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, empat Pejabat Tinggi *Uni Eropa* (EU), Juru Bicara Komisi Eropa Nabilla Massarali, dan empat Pemimpin Tinggi EU (CNN, 2021). Para pemimpin tersebut memberi dukungan besar terhadap demokrasi di Myanmar dan meminta militer Myanmar untuk dapat menghormati norma-norma demokrasi, aturan hukum, dan membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Tragedi kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terus berlanjut. Pada Juli 2021, 25 warga sipil dibunuh oleh militer di Depayin, menurut laporan Al-Jazeera (Al-Jazeera, 2022). Hampir semua korban yang ditemukan telah ditembak di kepala. Antara Februari dan Agustus, lebih dari 1000 orang tewas akibat kekerasan militer, termasuk 75 anak yang dibunuh dan 1000 anak yang juga ditangkap.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melakukan *shuttle diplomacy* pada tahun 2021 dengan berkunjung ke Brunei, Singapura, dan Thailand untuk mencari kesatuan pandangan terkait masalah kudeta tersebut. Ia juga membahas masalah ini dengan pihak-pihak di luar *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) seperti Amerika Serikat dan PBB. Apa yang dilakukan Menlu Indonesia dengan

campur tangan pada urusan negara lain tidak bisa dikatakan sebagai masalah domestik saja, melainkan masalah regional. Hal tersebut merupakan langkah yang dilakukan Indonesia dalam menghormati demokrasi dan HAM. Dan kudeta militer di Myanmar ialah isu kolektif ASEAN karena negara anggotanya sudah berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM sebagai salah satu norma dasar pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Dan diplomasi yang harus konsisten Indonesia lakukan ialah *soft diplomacy* dengan tidak memihak pada salah satu aktor demi tercapainya keamanan dan keharmonisan kawasan di ASEAN. Pendekatan Indonesia kepada Myanmar harus sebagai sahabat bukan sebagai orang yang ingin ikut campur. Langkah Indonesia dalam mengupayakan penyelesaian terhadap kudeta militer memang terkesan pelan, namun hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan Junta militer agar tetap mau diajak berunding dan berdialog. *Soft diplomacy* yang konsisten Indonesia lakukan sampai saat ini mencerminkan diplomasi sopan ala Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Hubungan baik Indonesia dan Myanmar telah terjalin sejak lama. Kedua negara kerap melakukan pertemuan-pertemuan dalam berbagai kegiatan. Kedekatan antar kedua negara tersebut membuat Indonesia senantiasa aktif dalam proses penyelesaian konflik di Myanmar. Seperti konflik kudeta militer yang menimpa Myanmar pada awal tahun 2021 lalu, Indonesia memberikan beberapa sikap dan kebijakan dalam menanggapi konflik tersebut sekaligus sebagai upaya penyelesaian konflik. Alasan Indonesia memberikan sikap terkait kudeta militer di Myanmar didasarkan pada kepercayaan yang diperoleh Indonesia dari Myanmar melalui hubungan baik yang telah terjalin sejak lama dan langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia termasuk dalam agenda politik luar negeri Indonesia. Namun hubungan baik yang telah terjalin oleh kedua negara tetap tidak bisa membuat Myanmar menyetujui adanya dialog dan desakan untuk menghentikan kekerasan. Maka dari itu Indonesia mengambil langkah dengan melakukan *shuttle diplomacy*. Diplomasi tersebut dilakukan demi mendapatkan ruang

untuk berdialog dan bernegosiasi dengan Junta militer. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang penulis tarik ialah:

"Bagaimana *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan terhadap Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021-2023.
2. Mendeskripsikan hubungan diplomatik Indonesia dan Myanmar.
3. Mendeskripsikan *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan terhadap Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, kajian ini hendaknya memperdalam pemahaman kita mengenai inisiatif dari diplomasi Indonesia dalam menyikapi kudeta militer di Myanmar. Kegunaan lainnya ialah sebagai referensi untuk penelitian terkait Hubungan Internasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil beberapa kajian literatur yang relevan dan dapat menunjang penulisan skripsi yang berjudul "*Shuttle Diplomacy* Indonesia terhadap Myanmar Pasca Kudeta Militer Tahun 2021". Penulis bermaksud menggunakan informasi dalam tinjauan literatur ini sebagai referensi, yang nantinya akan membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. Beberapa *literature review* yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama, membahas tentang bagaimana peran kepemimpinan Indonesia dalam mengatasi krisis politik Myanmar pada tahun 2021 dengan berlandaskan politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan constructive engagement digunakan dalam memandang bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dilakukan dalam proses demokratisasi yang selalu diperjuangkan di Myanmar (Benarrivo, Rachmat, & Kautsar, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peluang serta tantangan untuk Indonesia dalam kepemimpinannya di ASEAN untuk menyelesaikan krisis ini. Isu Myanmar selalu menjadi perhatian tersendiri bagi Indonesia, khususnya dari peran Indonesia di ASEAN. Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi poros utama di ASEAN dalam penyelesaian permasalahan yang muncul dari negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Alhasil kapasitas kepemimpinan Indonesia di sektor kemanan ASEAN diuji. Mantan Menlu RI yaitu Hassan Wirayuda menekankan bahwa sebaiknya Indonesia lewat ASEAN terus konsisten melanjutkan dialog dengan Myanmar dan selalu menjadikan Myanmar sebagai bagian dari keluarga Indonesia (Benarrivo, Rachmat, & Kautsar, 2021). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukan peluang yang Indonesia miliki ialah pengalaman transisi demokrasi Indonesia yang berhasil, kemampuan diplomasi Indonesia yang baik, serta model kebijakan luar negeri Indonesia bebas aktif. Tantangan serta hambatan yang

Indonesia dapatkan ialah adanya doktrin non-intervensi ASEAN, perlawanan dari masyarakat Myanmar, dan inkonsistensi dari komitmen dalam negeri Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia.

Penelitian kedua, menjelaskan tentang bagaimana Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, dan salah satu anggota pendiri ASEAN, memimpin upaya penyelesaian krisis kudeta militer di Myanmar (Aziz, Indraswari, Khatimah, & Azzahra, 2023). Indonesia membawa masalah Myanmar ke pertemuan pemimpin ASEAN pada 24 April 2021 di Jakarta dan berhasil menghasilkan *Five Point Consesnsus* (Aziz, Indraswari, Khatimah, & Azzahra, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan *constructive engagement* dalam memandang bagaimana demokratisasi yang diupayakan Indonesia di Myanmar. Indonesia dinilai berhasil dalam menjalankan demokrasi di negaranya. Menurut temuan dari penelitian ini, Indonesia berhasil dalam mendorong demokratisasi di Myanmar. Namun dalam penyelesaian krisis di Myanmar, sejauh ini masih belum ada kemajuan meskipun telah berhasil membuat kesepakatan pada pertemuan Pemimpin ASEAN pada 24 April 2021 lalu (Aziz, Indraswari, Khatimah, & Azzahra, 2023).

Penelitian ketiga, fokus menjelaskan tentang apa akar masalah dari konflik kudeta militer di Myanmar serta bagaimana upaya penyelesaian masalah dari Indonesia sebagai anggota lewat keanggotaannya di ASEAN. Teori *Conflict Triangle* oleh Johan Galtung digunakan dalam menganalisis penelitian ini (Widodo, et al., 2022). Lewat teori ini akar dari kekerasan yang terjadi akan didapatkan. Lewat ASEAN, Indonesia melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik kudeta militer di Myanmar. Upaya yang Indonesia lakukan ialah mengirim utusan khusus untuk menjembatani dialog dari pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan Indonesia demi menjaga stabilitas kawasannya yaitu Asia Tenggara. Hasil temuan dari penelitian ini ialah akar masalah dari konflik ini berasal dari besarnya *power* dan pengaruh dari partai NLD atau pihak militer dalam memimpin pemerintahan Myanmar dan para pejabat militer yang melindungi kepentingan ekonomi merekamempersulit ruang gerak untuk menyelesaikan konflik kudeta militer

Myanmar (Widodo, et al., 2022). Power yang dimiliki Junta Militer tidak memungkinkan adanya intervensi dalam bentuk apapun. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2020, Myanmar belum pernah merasakan demokrasi yang nyata. Myanmar menganut sistem politik demokrasi semu di bawah bayang-bayang kekuatan militer di pemerintahan (Widodo, et al., 2022).

Penelitian keempat, Peran ASEAN pasca pengambilalihan militer di Myanmar dan pandemi COVID-19 menjadi topik penting untuk dibahas. Penelitian ini menggali fungsi ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara pasca kudeta di Myanmar, rincian bantuan yang diberikan ASEAN ke Myanmar, dan tantangan yang dihadapi ASEAN dalam mengatasi permasalahan negara tersebut. Ide dan teori yang digunakan dalam analisis ini berkaitan dengan diplomasi kemanusiaan dan *Human Security*. Menurut teori *Human Security*, menjaga masyarakat dari bahaya sama pentingnya dengan mengamankan negara (Nau, Jekaisa, & Priscilla, 2023). Ancaman-ancaman tersebut berasalah dari masalah ekonomi, Kesehatan, pangan, lingkungan personal, komunitas, dan politik. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya ancaman keamanan terhadap rakyat Myanmar setelah terjadinya kudeta militer pada tahun 2021. Kudeta militer di Myanmar telah menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan karena pada waktu itu bersamaan dengan adanya pandemi Covid-19 (Nau, Jekaisa, & Priscilla, 2023). Oleh karena itu, penting bagi ASEAN untuk terlibat dalam mengakhiri kudeta militer dan membantu mereka yang membutuhkan. Salah satu hambatan utama bagi ASEAN menurut temuan penelitian ini adalah filosofi non-intervensi. Meski demikian, ASEAN tetap terlibat aktif dalam memerangi penyebaran COVID-19 dengan memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk obat-obatan dan peralatan medis ke Myanmar untuk membantu para korban kudeta tersebut.

Penelitian kelima, adalah penelitian yang ditulis oleh Aviscenna dan Najamuddin (2023) yang didalamnya terdapat kesepakatan *five point consensus* ASEAN yang merinci respon organisasi tersebut terhadap bencana kemanusiaan pasca kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep organisasi internasional. Sebagai sarana bagi

negara-negara merdeka untuk memajukan agenda mereka pada skala global dan regional. IGO menyediakan forum yang dapat diandalkan bagi negara-negara untuk terlibat dalam konsultasi dan diskusi satu sama lain (Ar-Rasyid & Rijal, 2023). Dalam ranah hubungan internasional, organisasi memberikan sejumlah kontribusi penting, termasuk memediasi konflik, mengembangkan norma atau perjanjian, dan menegakkan kepatuhan antar anggota. Melalui *five point consensus,* ASEAN telah memenuhi peran organisasi regionalnya dalam menyelesaikan konflik di Myanmar. Meski demikian, pengabaian junta militer terhadap consensus tersebut menjadi tantangan bagi ASEAN dalam upayanya mengatasi bencana kemanusiaan di Myanmar (Ar-Rasyid & Rijal, 2023).

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian terdahulu

No	Penulis & Jenis Penelitian	Konsep & Teori	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Angga Nurdin Rachmat, Renaldo Benarrivo, & Reyghita Fay Kautsar (2021) Metode Penelitian Kualitatif	*The Constructive Engagement Approach*	Kepemimpinan Indonesia dalam mengatasi krisis politik Myanmar pada tahun 2021 dengan berlandaskan politik luar negeri bebas aktif.	Indonesia menghadapi kendala dalam upayanya menyelesaikan konflik di Myanmar. Kendala tersebut ialah adanya doktrin non-intervensi ASEAN, perlawanan dari Myanmar Masyarakat, dan inkonsistensi dari komitmen dalam negeri Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia.
2.	Aswin Ariyanto Azis, Firstyarinda Valentina Indraswari, Annisa Ridhatul Khatimah, & A. Qalbi Faathimah Azzahra (2023) Metode Penelitian Kualitatif	*The Constructive Engagement Approach*	Peran Indonesia dalam memimpin upaya penyelesaian krisis di Myanmar lewat ASEAN. Indonesia membawa masalah Myanmar ke pertemuan Pemimpin ASEAN pada 24 April 2021, menghasilkan konsensus lima poin dalam	Meski telah berhasil membuat kesepakatan untuk krisis di Myanmar, namun sejauh ini belum ada kemajuan.

No	Penulis & Jenis Penelitian	Konsep & Teori	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
			pertemuan khusus Jakarta untuk Myanmar.	
3.	Pujo Widodo, Iswati, Nour Zatullah, Anindita Nur Hidayah, Khairul Umam Manik, Andi M. Ilham Rusali Masdar, M. Dadang Wardhana Mas Bakar, & Achmed Sukendro (2022) Metode Penelitian Kualitatif	*Conflict Triangle Theory*	Peran Indonesia di ASEAN dalam isu kudeta militer di Myanmar dengan melakukan berbagai upaya yang salah satunya dengan mengirim utusan khusus untuk menjembatani dialog dari pihak-pihak yang berkonflik. Hal ini dilakukan Indonesia demi menjaga stabilitas kawasannya yaitu Asia Tenggara.	Akar masalah dari konflik ini ialah besarnya power dan pengaruh dari partai NLD atau pihak militer dalam memimpin pemerintahan Myanmar dan para pejabat militer yang melindungi kepentingan ekonomi merekamempersulit ruang gerak untuk menyelesaikan konflik kudeta militer Myanmar.
4.	Novriest Umbu Walangara Nau, Heyna Jekaisa, & Sherin Natasya Priscilla (2023) Metode Penelitian Kualitatif	Konsep *Human Security* dan Diplomasi Kemanusiaan	Peran ASEAN sebagai organisasi regional Asia Tenggara pasca kudeta Myanmar, bentuk bantuan yang diberikan ASEAN kepada Myanmar, dan kendala ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan di Myanmar.	Prinsip non-intervensi ASEAN merupakan salah satu tantangan besar bagi ASEAN. Meski demikian, ASEAN tetap berperan aktif dengan memberikan bantuan kemanusiaan untuk memerangi penyebaran Covid-19 seperti bantuan peralatan medis dan obat-obatan ke Myanmar untuk membantu para korban pasca kudeta dan Covid-19.
5.	Aviscenna Maulana Ar Rasyid & Najamuddin Khairur Rijal (2023) Metode Penelitian Kualitatif	Konsep *Intergovernmental Organization* (IGO)	Peran ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan pasca kudeta tahun 2021 di Myanmar melalui kesepakatan ASEAN *Five Point Consensus*.	Dalam mengatasi konflik di Myanmar, ASEAN telah menghasilkan *Five Point Consensus.* Namun junta militer enggan menghormati consensus tersebut.

Sumber: Data diolah peneliti dari jurnal nasional, 2023

Dari kelima penelitian tersebut secara keseluruhan membahas upaya dan peran Indonesia lewat kepemimpinannya di ASEAN terhadap kudeta militer yang menimpa Myanmar. Bagaimana Indonesia memberi respon dan menawarkan solusi untuk membantu menyelesaikan konflik kudeta militer yang menimpa Myanmar. Pembahasan mengenai peran dan upaya Indonesia dalam penyelesaian konflik kudeta militer yang menimpa Myanmar pada penelitian-penelitian diatas penulis jadikan acuan dalam memandang dan menganalisis isu tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan kelima penelitian tersebut ialah penulis menggunakan *shuttle diplomacy* sebagai kebijakan yang Indonesia berikan terhadap Myanmar. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan teori dan konsep yang berbeda-beda dalam menganalisis. Ada yang menggunakan pendekatan *constructive engagement,* teori *conflict triangle* oleh Johan Galtung, konsep *human security,* diplomasi kemanusiaan, dan konsep intergovernmental organization atau IGO. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori diplomasi dan *shuttle diplomacy* dalam menganalisis penelitian serta untuk menjawab tujuan penelitian penulis yaitu mendeskripsikan Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021, mendeskripsikan hubungan diplomatik Indonesia dan Myanmar, dan mendeskripsikan *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan terhadap Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Diplomasi

Seorang diplomat, sering kali berbicara atas nama suatu negara atau organisasi internasional, terampil dalam seni dan ilmu negosiasi (Constantinou & Sharp, 2016). Dalam konteks kata “diplomasi” mengacu pada praktik diplomasi internasional, yang berkaitan dengan masalah perdagangan, budaya, dan ekonomi. Kebanyakan orang memandang diplomasi sebagai strategi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan bersikap licik. Sebagai alat utama untuk menyelesaikan perselisihan global demi mencapai keharmonisan global, diplomasi telah semakin penting dan penting dalam tata negara modern. Pemerintah dapat mencapai

tujuannya melalui cara-cara diplomatik. Diplomasi memiliki tiga ciri utama, yaitu komunikasi, dialog, dan norma (Bjola, 2018). Hal yang paling mendasar dalam diplomasi ialah komunikasi yang terlembaga, dialog antara aktor, dan memiliki norma atau aturan yang mengatur komunikasi tersebut. Tujuan utama diplomasi adalah untuk mencapai dan mempertahankan kebijakan luar negeri pemerintah dengan memengaruhi kebijakan dan perspektif pemerintah negara lain. Menurut G. R. Berridge, diplomasi adalah suatu kegiatan politik yang dilakukan oleh para aktor diplomasi dengan tujuan untuk mencapai kepentingan negaranya lewat negosiasi tanpa menggunakan kekerasaan, paksaan, propaganda, dan hukum (Berridge, 2002). Diplomasi juga pada dasarnya adalah kegiatan politik yang mana merupakan kebutuhan penting dalam hubungan antar negara. Dalam prosesnya diplomasi digunakan sebagai alat komunikasi dari negara yang melakukan Kerjasama demi mencapai tujuan negaranya dengan menggunakan perjanjian formal ataupun tanpa perjanjian tertulis. Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh agen diplomatic saja, namun dilakukan juga oleh para pejabat dan orang-orang di pemerintahan suatu negara. Setiap negara terlibat dalam diplomasi sebagai sarana untuk menjaga keamanan bersama dan memajukan kepentingannya sendiri dengan mempengaruhi negara lain. Istilah "diplomasi" mengacu pada cara pemerintah bekerja sama dengan kelompok lain untuk mencapai tujuan bersama dan menjunjung cita-cita bersama. Ketika diplomat suatu negara melakukan tugasnya dengan baik, mereka dapat membantu negaranya mencapai tujuannya dan meningkatkan reputasinya di luar negeri.

a. Aktor Diplomasi

Perwakilan diplomatik dan aktor diplomatik adalah istilah yang dapat dipertukarkan. Utusan negara yang dikirim ke negara lain untuk melakukan kontak formal antar negara dikenal sebagai utusan diplomatik. Instrumen utama kebijakan luar negeri adalah perwakilan diplomatik. Sebagai duta besar negaranya masing-masing, diplomat bertindak sebagai wajah negara tersebut. Sebagian besar kedutaan dan

konsulat berlokasi di ibu kota negara tuan rumah. Beberapa perwakilan diplomatik menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan resolusi yang disahkan oleh Kongres Wina tahun 1815 dan Kongres Auxla Chapella pada tahun 1818 (Kongres Achen). Menurut (Kwan, 2017). Berikut adalah beberapa tingkatan dari perwakilan diplomatik:

1. Duta Besar (*Ambassador*)

   Seorang diplomat tingkat tinggi dengan wewenang yang lengkap dan luar biasa dikenal sebagai duta besar. Mengirim duta besar ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang kuat adalah praktik diplomasi yang umum. Penunjukan duta besar ini merupakan hak prerogatif presiden.

2. Duta (*Gerzant*)

   Duta Besar (*Gerzant*) adalah diplomat lain yang statusnya lebih rendah dari duta besar. Menteri luar negeri bertanggung jawab menunjuk duta besar. Duta Besar diharuskan berunding dengan pemerintahnya untuk melaksanakan semua kewajibannya.

3. Menteri Residen

   Tanggung jawab menteri residen satu-satunya adalah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan negara; mereka tidak dianggap sebagai wakil negara. Pada dasarnya melanggar hukum jika seorang menteri dalam negeri bertemu dengan kepala negara tempat mereka bertugas.

4. Kuasa Usaha (*Charge d'Affair*)

   Menteri luar negeri menunjuk utusan tingkat rendah yang dikenal sebagai kuasa usaha.

5. Pejabat Pembantu

   Merupakan perwira militer, dan atase teknis, yang merupakan spesialis urusan masyarakat, adalah dua jenis atase yang dapat ditunjuk oleh duta besar dengan wewenang penuh.

b. Tugas aktor Diplomasi

Misi diplomatik akan diberi tanggung jawab khusus oleh negara pengirim. Tanggung jawab yang diberikan mencerminkan banyaknya

peran penting yang dimainkan oleh pejabat diplomatik dalam mewakili negara pengirimnya (Setiawan, 2016). Beberapa contoh dari berbagai macam penugasan yang diberikan kepada perwakilan diplomatik adalah:

1. Representasi

   Selain peran resmi mereka sebagai duta besar, aktor diplomatik memiliki wewenang tambahan untuk mengadvokasi pandangan politik negaranya, melakukan penyelidikan dengan pemerintah negara tuan rumah, dan berpartisipasi dalam demonstrasi.

2. Negosiasi

   Ini adalah misi diplomatik, negosiasi ini. Negosiasi dan percakapan adalah alat yang dapat digunakan diplomat, baik dengan negara tuan rumah maupun dengan negara asing. Negosiasi adalah bagian umum dalam menjaga hubungan diplomatik antar negara. Ada kemungkinan lebih dari dua negara terlibat dalam negosiasi.

3. Observasi

   Pemeriksaan yang cermat terhadap setiap peristiwa di negara penerima adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang observasi. Semua peristiwa yang terjadi di negara penerima harus dilaporkan kembali ke negara pengirim oleh perwakilan diplomatik.

4. Proteksi

   Proteksi atau perlindungan adalah kegiatan untuk melindungi kepentingan warga negaranya di luar negeri.

5. Persahabatan

   Salah satu peran utama seorang diplomat adalah membina hubungan baik antar negara, oleh karena itu wajar jika aktor diplomatik mempunyai tanggung jawab tambahan untuk membina hubungan yang lebih baik antara negara pengirim dan penerima.

c. Fungsi Aktor Diplomasi

Konvensi Wina tahun 1969 (Convention, 2005) sebagian besar mengatur kegiatan perwakilan diplomatik. Berikut beberapa tugasnya:

1. Berdiri untuk negara yang mengirimkan pesan di dalam negara yang menerimanya.
2. Menjaga kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima tetap aman, dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional.
3. Buatlah perjanjian dengan pemerintah negara penerima.
4. Sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim, memberikan informasi terkini mengenai situasi dan kemajuan negara penerima.
5. Menjaga hubungan baik antara kedua negara.

Indonesia memiliki dasar politik luar negeri bebas aktif. Pemimpin-pemimpin Indonesia menerapkan prinsip ini dengan disesuaikan pada sistem internasional yang berjalan. Teori diplomasi ini menjadi relevan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mengetahui apakah diplomasi yang lakukan Indonesia terkait kudeta militer yang menimpa Myanmar efektif atau tidak. Indonesia juga memilih untuk melakukan upaya perdamaian dengan melakukan *soft diplomacy* terhadap Myanmar. Cara diplomasi Indonesia yang pelan dan tidak menggurui diharapkan dapat membantu menyelesaikan persoalan kudeta militer Myanmar. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki tujuan dan kepentingan dalam pola kebijakannya, yaitu untuk menjaga perdamaian dunia.

2.2.2 *Shuttle Diplomacy*

a. Definisi *Shuttle Diplomacy*

Shuttle diplomacy adalah diplomasi yang dilakukan dengan melibatkan pihak luar yang menjadi penengah dari pihak-pihak yang bersengketa (Shedrach, 2019). Ada enam cara mediasi konflik dari John Forester yang salah satunya ialah dengan *shuttle diplomacy*. Ia

mengatakan bahwa *shuttle diplomacy* adalah cara yang efektif dan professional dalam upaya penyelesaian masalah karena *shuttle diplomacy* memfasilitasi dan memudahkan pihak-pihak untuk menyampaikan pikirannya masing-masing (Forester, 1997). Para pihak yang bersengketa tidak melakukan kontak satu sama lain. Dan dalam proses dilakukannya *shuttle diplomacy*, pihak luar yang menjadi penengah akan bepergian berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. *Shuttle diplomacy* dipermudah dengan transportasi udara dan komunikasi modern yang memudahkan mediator atau pihak luar melakukan perjalanan jauh dengan mudah dari pihak-pihak yang bernegosiasi. *Shuttle diplomacy* dilakukan ketika ada kondisi dimana pihak yang berselisih menolak untuk berdialog satu sama lain. Nantinya dengan *shuttle diplomacy* ini dapat menyelesaikan perselisihan mereka. Poin penting dalam *shuttle diplomacy* adalah adanya pihak ketiga yang berfungsi sebagai pihak yang menyampaikan informasi secara bolak-balik dan sebagai pemberi saran penyelesaian konflik. Dengan tidak dilakukannya komunikasi langsung antara pihak-pihak yang berkonflik diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan situasi akan membaik.

b. Sejarah *Shuttle Diplomacy*

Istilah *shuttle diplomacy* pertama kali muncul terinspirasi oleh tindakan Henry Kissinger selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yang melakukan perjalanan bolak-balik di Timur Tengah selama berbulan-bulan dalam upaya membantu penyelesaian konflik bersenjata pasca Perang Arab-Israel pada tahun 1973 (Shedrach, 2019). Upaya ini dilakukan dengan menggunakan "*American Plan*" yang fokus utamanya ialah memisahkan gencatan senjata dari masalah jangka panjang dan juga meminimalkan keterlibatan Rusia dalam proses penyelesaiannya. Keberadaan *shuttle diplomacy* telah terdukung oleh dunia yang menjadi lebih modern dan praktis. Mulai dari adanya alat komunikasi serta transportasi yang memudahkan negosiator atau mediator dalam

melakukan *shuttle diplomacy*. Cerita lain tentang praktek *shuttle diplomacy* juga ada dari George Mitchell dalam sengketa Northern Ireland pada tahun 1999, ia berperan sebagai mediator dalam sengketa tersebut. Kemudian juga ada Presiden Amerika Serikat ke-29 yaitu Jimmy Carter yang menjadi mediator antara Israel dan Mesir pada tahun 1973. Saat itu Arab tidak ingin mengakui kedaulatan Israel sebagai suatu negara. Hubungan antara Presiden Mesir, Sadat, dan Perdana Menteri Israel yaitu Begin sangat menegangkan dan pelik. Negosiasi yang dilakukan untuk keduanya sangatlah sulit, namun Presiden Jimmy Carter tetap melakukan negosiasi secara tertutup dan privat. Ia melakukan *shuttle diplomacy* selama dua minggu dan berkat kegigihannya ia berhasil membuat Presiden Mesir, Sadat, dan Perdana Menteri Israel yaitu Begin menyetujui perjanjian perdamaian antara keduanya (Shedrach, 2019).

c. Model *Shuttle Diplomacy*

1. *Dynamic Procedure*

Shuttle diplomacy ialah diplomasi yang dilakukan secara bolak-balik melalui mediator. Dalam praktiknya, mediator melakukan negosiasi secara bolak-balik bertemu secara pribadi antar pihak-pihak yang berselisih. Pada penelitian ini penulis menggunakan model *shuttle diplomacy dynamic procedure* yang mana dalam proses menemukan solusi dan kesepakatannya bersifat dinamis (Gottardi & Mezzetti, 2024). Mediator membantu masing-masing pihak yang berselisih untuk menemukan solusi penyelesaian konflik secara bertahap. Dalam proses tersebut pihak yang berselisih dapat meninjau ulang kembali solusi yang ditawarkan dan dapat mengajukan syarat kesepakatan. Dengan cara ini *shuttle diplomacy* yang dilakukan akan mencapai penyelesaian terbaik untuk masing-masing pihak walaupun memang memakan waktu yang cukup lama. Tergantung bagaimana kesepakatan antar pihak yang berselisih tercapai. Dengan model prosedur yang dinamis maka akan lebih mempermudah prosesnya.

2. *Static Mediation Procedure*

Berbeda dengan model *shuttle diplomacy dynamic procedure, static procedure* atau *static mediation procedure* bersifat tetap dan kaku dimana dalam proses mencapai kesepakatannya tidak bisa berubah-ubah menyesuaikan kondisi atau keadaan yang diinginkan bersifat (Gottardi & Mezzetti, 2024). Sehingga akan cukup sulit mencapai penyelesaian karena jika kesepakatan tidak sesuai keinginan pihak yang berselisih maka tidak bisa di tinjau ulang atau diperbaiki agar lebih menguntungkan masing-masing pihak. Keadaan yang kaku ini diakibatkan oleh pihak yang tidak ingin menyetujui kesepakatan dan menolak untuk melakukan dialog. Sehingga tidak ada kemajuan dalam proses mediasi.

d. Kelebihan *Shuttle Diplomacy*

Ketika ada suatu konflik, terkadang jika komunikasi langsung dilakukan akan membuat konflik tersebut semakin pelik. *Shuttle Diplomacy* ada dimaksudkan untuk mempermudah konflik mereda atau malah menjadi damai dengan tidak membuat pihak-pihak yang sedang bersitegang melakukan kontak langsung karena ditakutkan konflik malah semakin tegang. Dengan adanya *shuttle diplomasi* yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang membawa informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik maka diharapkan komunikasi yang baik dapat terwujud. Pihak ketiga atau mediator atau perantara dalam *shuttle diplomacy* ini dapat menyampaikan pertanyaan, jawaban, bahkan menyarankan ide dan rekomendasi secara privat untuk de-eskalasi konflik yang tidak dapat dilakukan jika negosiasi dilaksanakan secara terbuka terhadap publik (Berridge, 2002). Dengan menjaga komunikasi secara privat antara pihak berkonflik dengan mediator maka hal ini tidak akan membuat kedua belah pihak yang berkonflik berdebat dan memperburuk konflik. Dengan cara ini juga nantinya pihak yang berkonflik dapat mulai membangun kepercayaan satu sama lain. Ketika kepercayaan itu mulai muncul maka kesepahaman akan muncul juga.

Banyak kelebihan dari pelaksanaan *shuttle diplomacy* pada penyelesaian konflik. Dengan *shuttle diplomacy* keamanan dan kenyamanan pihak yang bertikai akan lebih terjamin dalam melakukan pertemuan secara privat dengan negosiator. *Shuttle diplomacy* merupakan cara yang baik dalam menghadapi konflik internasional. Melalui *shuttle diplomacy* negosiator akan mendapatkan informasi rahasia melalui komunikasi langsung antar kedua belah pihak berkonflik. Pertemuan strategis secara terpisah tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi secara privat dan informasi tersebut sangat berharga digunakan dalam memecahkan konflik.

Dalam isu kudeta militer yang terjadi di Myanmar, Indonesia menjadi mediator dalam menengahi dan membantu menyelesaikan kekerasan yang terjadi di Myanmar. Lewat keketuaannya di ASEAN, Indonesia melakuka *shuttle diplomacy* dengan mengajak negara-negara ASEAN serta negara mitra ASEAN untuk berdialog dan mendapatkan solusi untuk Myanmar. Teori ini membantu penulis dalam melihat bagaimana proses *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan. Model *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan ialah model *dynamic procedure* dan *static mediation procedure.* Model *dynamic procedure* menemukan solusi dan kesepakatan secara dinamis, dimana mediator membantu masing-masing pihak yang berselisih untuk menemukan solusi penyelesaian konflik secara bertahap. Pihak yang berselisih dapat meninjau ulang solusi yang ditawarkan dan dapat mengajukan syarat kesepakatan. Berbeda dengan *static mediation procedure* yang dalam prosesnya kaku dan tidak menyesuaikan keadaan atau keinginan pihak yang berselisih.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti mendeskripsikan bagaimana diplomasi yang Indonesia lakukan terhadap Myanmar pasca kudeta militer. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian peneliti yaitu bagaimana diplomasi Indonesia terhadap Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021-2023. Teori

diplomasi dan *shuttle diplomacy* digunakan oleh peneliti untuk menjawab dan mengetahui pertanyaan penelitian tersebut.

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

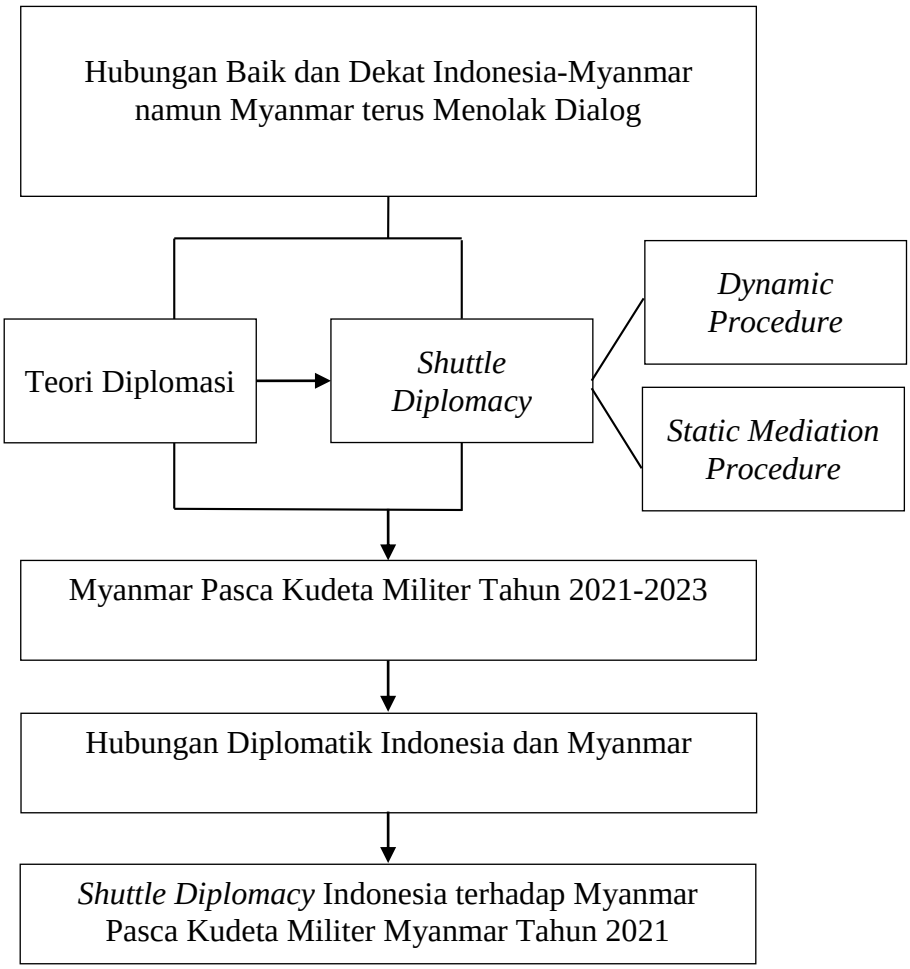

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan teknik deskriptif dan metodologi kualitatif dalam penelitian ini. Untuk mengkaji fenomena sosial dari perspektif teoritis atau interpretatif, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (Matthews & Ross, 2010). Prinsip deskriptif penulis gunakan dalam menganalisis. Fokus bentuk penelitian ini adalah pada proses dan makna, dengan landasan teori yang menjadi acuan untuk menjamin bahwa penelitian tersebut sejalan dengan kenyataan di lapangan. Penulis ingin memberikan penjelasan data secara mendalam dengan menggunakan data linguistik dan menggunakan basis meaning dalam analisis data. Penulis menguraikan secara deskriptif terkait bagaimana *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan terhadap Myanmar pasca kudeta militer pada tahun 2021. Tahapan ini harus diikuti oleh peneliti untuk menjamin kesinambungan pemikiran yang akan menghasilkan temuan penelitian. Langkah ini dilakukan secara sistematis, logis, dan rasional.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat diartikan sebagai pembatasan masalah. Masalah penelitian muncul akibat adanya *gap* antara kondisi yang ada di lapangan dengan harapan yang ingin dicapai atau ketidaksesuaian antara kenyataan yang sebenarnya dan apa yang diharapkan. Dalam penelitian ini penulis fokus pada *shuttle diplomacy* yang dilakukan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian peneliti yaitu bagaimana *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan terhadap Myanmar pasca kudeta militer pada tahun 2021. Peneliti menggunakan teori diplomasi dan *shuttle diplomacy* untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat untuk memperoleh informasi yang nantinya data tersebut akan digunakan dalam penelitian (Gray, Williamson, Karp, & Dalphin, 2007). Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber, antara lain dokumen, sumber, peristiwa atau kegiatan, tempat atau lokasi, dan objek. Kata, frase, kalimat, dan tindakan biasanya merupakan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis. Penulis menggunakan buku, jurnal, perjanjian internasional (seperti piagam PBB), makalah, artikel, dan *website* sebagai sumber data untuk mengumpulkan informasi terkait kudeta militer di Myanmar dan *shuttle diplomacy* yang dilakukan Indonesia terhadap Myanmar paska kudeta militer 2021.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara memperoleh informasi yang akan digunakan dalam penelitian, yang kemudian informasi tersebut akan digunakan untuk menyusun data (Gill, Stewart, Treasure, & Chadwick, 2008). Dalam penyusunannya penulis menggunakan teknik pengumpulan data *library research* atau studi kepustakaan dengan membaca buku dan penelitian terdahulu. Penulis juga menggunakan sumber data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan melalui buku, jurnal, perjanjian internasional (seperti piagam PBB), makalah, artikel, dan *website* tentang kudeta militer di Myanmar dan *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan terhadap Myanmar. Sumber-sumber data yang penulis ambil berasal dari artikel jurnal yang kredibel, pernyataan pers dari situs resmi, dan berita *online* dari situs-situs resmi.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data mengenai kudeta militer dan *shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan selesai, maka dilakukan langkah terakhir yaitu analisis data. Peneliti akan menganalisis data guna memecahkan masalah penelitian dan menjawab tujuan penelitian. Analisis data merupakan bagian terpenting dari metode ilmiah. Berdasarkan buku Miles dan

Hubberman yang penulis gunakan, terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam proses menganalisis data, antara lain ialah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Berikut penjelasannya :

1. Kondensasi Data

   Proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data disebut kondensasi data. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan informasi dari situs resmi, artikel, dan buku yang berkaitan dengan kudeta militer Myanmar di tahun 2021 dan beberapa data terkait shuttle diplomacy yang Indonesia lakukan sejak tahun 2021 sampai 2023. Data yang diperoleh harus sesuai denga apa yang dibutuhkan, sehingganya penelitian akan fokus dan terarah dengan sangat baik.

2. Penyajian Data

   Penyajian data adalah proses menggabungkan informasi untuk memberikan gambaran tentang suatu peristiwa. Peneliti menggabungkan seluruh informasi dan data yang sebelumnya telah peneliti kumpulkan. Kemudian peneliti membuat narasi dan tabel untuk memudahkan dalam memahami data secara keseluruhan atau bagian tertentu dari hasil penelitian.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

   Setelah seluruh data terkumpul dan telah dielaborasi, peneliti kemudian menarik kesimpulan akhir. Peneliti menjelaskan, menganalisis, dan menguraikan data-data penting yang telah dikumpulkan sejak awal penelitian sehingga data tersebut dijadikan dasar kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian penulis dan benar-benar sesuai. Hal tersebut dilakukan karena kebenaran data harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Indonesia menunjukan peran aktif dalam penyelesaian kudeta militer Myanmar. Dalam upayanya menjaga perdamaian dunia, Indonesia kerap memberikan bantuan kemanusiaan, upaya dialog, dan diplomasi. Diplomasi yang Indonesia lakukan ialah *shuttle diplomacy.* Diplomasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk terciptanya ruang berdialog untuk mencari solusi bersama dan tentunya perdamaian untuk Myanmar. *Shuttle diplomacy* yang Indonesia lakukan memiliki dua model, yaitu *static mediation procedure* yang bersifat *static* dan juga kaku, serta model *dynamic procedure* dan bersifat dinamis dan dapat berubah-ubah menyesuaikan kondisi dan keadaan. Indonesia melakukan *Shuttle diplomacy* terhadap Myanmar, pemangku kepentingan Myanmar yang termasuk oposisi junta militer, negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN. Secara keseluruhan posisi yang Indonesia sampaikan pada dialog-dialog tersebut antara lain ialah :

1. Pembahasan mengenai perkembangan situasi di Myanmar.
2. Pembahasan mengenai peran ASEAN dalam membantu konflik kudeta militer di Myanmar.
3. Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar diutamakan.
4. Membantu Myanmar dalam melakukan transisi demokrasi.
5. Segera dilakukan pertemuan dari seluruh Menlu negara ASEAN.
6. Rekonsiliasi nasional antara pihak militer dan pihak oposisi yaitu partai demokrasi Myanmar untuk menemukan solusi yang efektif untuk Myanmar.
7. Seruan kepada pihak militer agar menghentikan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang menentang kudeta.
8. Desakan kepada Myanmar untuk mau diajak berdialog untuk menghentikan kekerasan dan mengembalikan Myanmar ke negara

demokrasi.

9. Seluruh anggota ASEAN harus menghormati dan menaati prinsip-prinsip ASEAN *Charter*.
10. Kunjungan kemanusiaan kepada para *detainee* atau para tahanan politik yang ditahan oleh Junta Militer.
11. Bantuan kemanusiaan untuk Myanmar.

Dalam prakteknya Myanmar masih enggan untuk mematuhi prinsip yang ada pada ASEAN Charter. Setelah berhasil dilangsungkan pertemuan para presiden dari negara ASEAN lewat ALM di Jakarta 2021 lalu dan dihadiri langsung oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang menghasilkan *Five Point Consensus*. Meskipun pertemuan tersebut menghasilkan *Five Point Consensus*, Jenderal Min Aung Hlaing masih enggan untuk menaati solusi dari ASEAN. Maka perlu diberikan solusi yang menguntungkan semua pihak di Myanmar agar semua pihak dapat menyetujui usulan yang dibuat, termasuk junta militer.

Seluruh hasil dari *shuttle diplomacy* diatas disetujui oleh Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Tongkok, Jepang, dan CRPH. Aung San Suu Kyi juga menyetujui terkait prinsip *five point consensus* dan penghentian kekerasan. Hal tersebut ia sampaikan lewat pertemuannya dengan Menlu Thailand. Namun semua ini akan percuma bilamana Myanmar terutama junta militer itu sendiri yang melakukan kudeta tidak kunjung menunjukkan sikap menghormati *five point consensus* yang dibuat ASEAN. Sebagai anggota ASEAN sudah selayaknya ia mematuhi piagam ASEAN dan *five point consensus* tersebut.

Pada KTT ASEAN ke-43 di Tokyo, lewat kepemimpinannya di ASEAN, Presiden Jokowi menginisiasi pembentukan mekanisme troika untuk penyelesaian konflik kudeta militer di Myanmar. Dengan mekanisme Troika ini, Indonesia akan terus konsisten memberikan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan lewat ASEAN dan AHA Centre. Namun bantuan kemanusiaan yang diberikan mengalami kendala. Kendala tersebut ialah sulitnya akses ke wilayah-wilayah yang tidak ada pengawasan pihak militer Myanmar bahkan serangan baku tembak dari

kelompok bersenjata yang tak dikenal pun dapat terjadi. Namun Indonesia tidak menyerah dan terus menjembatani dialog dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai. Karena sekarang yang menjadi fokus utama adalah korban atau rakyat Myanmar. Maka dari itu hal yang harus dilakukan pertama ialah menghentikan kekerasan. Jika kekerasan tidak dihentikan maka perdamaian tidak akan pernah tercapai. Indonesia dan negara-negara ASEAN telah sepakat untuk tidak sama sekali mentolerir terhadap kekerasan dan pencederaan nilai-nilai kemanusiaan. Dan setiap upaya penyelesaian yang dilakukan akan selalu didasari *Five Point Consensus* ASEAN. Namun tetap saja, walaupun ASEAN sudah berinisiatif mengambil banyak sikap untuk Myanmar, semua akan sia-sia jika tidak ada sikap dari militer Myanmar. Lewat ASEAN, Indonesia tetap konsisten memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar terlepas dari situasi di Myanmar. Isu di Myanmar tidak akan menjadikan ASEAN diam saja tidak melakukan apa-apa. Lewat ASEAN, Indonesia akan terus bergerak demi mewujudkan stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait *shuttle diplomacy* Indonesia terhadap Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. ASEAN diharapkan lebih tegas dalam menanggapi situasi di Myanmar melihat junta militer Myanmar yang melakukan kudeta militer masih enggan menaati *Five Point Consensus* dan ASEAN Charter.
2. Jika fokus Indonesia memang rakyat Myanmar sebaiknya perlu dilakukan dialog yang intensif terhadap CRPH karena CRPH adalah badan yang dipercaya oleh rakyat Myanmar dan keberadaannya lebih diakui oleh rakyat Myanmar.
3. Solusi yang diberikan untuk Myanmar sebaiknya menguntungkan untuk semua pihak yang terkait sehingga akan didapatkan kesepakatan mufakat yang cepat dimana pihak militer Myanmar menyetujui solusi yang dibuat.

4. Diperlukannya pengamanan militer yang ketat dan dapat menjamin keselamatan aktor kemanusiaan yang memberikan bantuan kemanusiaan. Sehingganya bantuan kemanusiaan yang diberikan sampai dengan selamat dan tidak akan ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.
5. Negara-negara ASEAN harus lebih kompak dalam memberikan respon terhadap permasalahan kudeta militer ini. Sehingga kedepannya progress terhadap penyelesaian konflik ini akan lebih baik dan cepat karena ini juga demi terjaganya kestabilan dan perdamaian kawasan Asia tenggara. Jika hanya Indonesia yang selalu berinisiatif sendiri penyelesaian akan lama dan ditakutkan korban jiwa dari peristiwa ini kian bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

AHACentre. (2022, January 2). *The AHA Centre Annual Report 2021: Myanmar Response*. From ahacentre.org: https://ahacentre.org/publication/annual-report-2021/

Al-Jazeera. (2022). *Myanmar Coup: A Year of Protest, Reprisals and Diplomatic Inertia*. From aljazeera.com: https://www.aljazeera.com/news/2022/2/1/myanmar-coup-a-year-of-protest-reprisals-and-diplomatic-inertia

Ar-Rasyid, A. M., & Rijal, N. K. (2023). Peran ASEAN dalam menangani Krisis Kemanusiaan Myanmar Melalui Kesepakatan ASEAN Five Point Consensus. *Indonesian Journal of International Relations Vol. 7, No. 1*, 22-42.

ASEAN, S. (2021). Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting. *Chairman's Statement on ALM*, 4.

Aziz, A. A., Indraswari, F. V., Khatimah, A. R., & Azzahra, A. Q. (2023). Indonesia's Approach Toward Myanmar's Crisis: Understanding the Different Perspectives of the Democracy Process in Indonesia and Myanmar and the Role of the Military. *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 12, No. 1*, 64-74.

BBC. (2021, February 6). *Kudeta Militer di Myanmar: Penguasa Tutup Akses Internet di Tengah Unjuk Rasa Terbesar di Yangon*. From BBCNewsIndonesia.com:https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55935789

BBC. (2021, April 24). *Myanmar: Military Chief Urged to Stop Violence on First Foreign Trip*. From bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-asia-56855166

Benarrivo, R., Rachmat, A. N., & Kautsar, R. F. (2021). 2021 Myanmar Political Crisis: Opportunity and Challenge for Indonesia Sectoral Leadership in ASEAN. *International Conference on Business Economic, Social Sciencies & Humanities*, 1-5.

Berridge, G. R. (2002). *Diplomacy Theory and Practice*. New York: Palgrave.

Bjola, C. (2018). *Understanding International Diplomacy Theory, Practice, Ethnics*. New York: Routledge.

Cambridge. (1989). Modern Asian Studies; The Emergence of the Asian System of Powers. *Cambridge University*, 561-595.

CNBC. (2021, March 30). *Ada Prabowo, RI dan Jepang Kompak Kutuk Junta Myanmar*. From cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20210330204400-4-234141/ada-prabowo-ri-dan-jepang-kompak-kutuk-

junta-myanmar

CNBC. (2022, July 21). *Jokowi Bakal Terbang ke China, Jepang dan Korsel, Ada Apa?* From cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20220721135307-4-357429/jokowi-bakal-terbang-ke-china-jepang-dan-korsel-ada-apa

CNBC. (2023, May 8). *Geger Baku Tembak di sini, Jokowi 'Teriak'*. From cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230508172924-4-435546/geger-baku-tembak-di-sini-jokowi-teriak

CNBC. (2023, March 10). *Gonjang-ganjing Kudeta Myanmar, RI Lakukan Diplomasi Senyap*. From CNBC Indonesia: https://www.cnbcindonesia.com/news/20230310165529-4-420720/gonjang-ganjing-kudeta-myanmar-ri-lakukan-diplomasi-senyap

CNN. (2021, February 15). *Ekspor RI ke Myanmar Bakal Terpengaruh Efek Kudeta*. From cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210215143116-92-606392/ekspor-ri-ke-myanmar-bakal-terpengaruh-efek-kudeta

CNN. (2021, Februari 4). *Polisi Myanmar Tuntut Suu Kyi Atas Kepemilikan Walkie Talkie*. From CNNIndonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210204110716-106-602145/polisi-myanmar-tuntut-suu-kyi-atas-kepemilikan-walkie-talkie

CNN. (2022, February 1). *Setahun Kudeta Myanmar, Rebutan Kekuasaan hingga Perang Sipil*. From cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220131185336-106-753531/setahun-kudeta-myanmar-rebutan-kekuasaan-hingga-perang-sipil

CNN. (2023, February 1). *2 Tahun Junta Militer Berkuasa, Bagaimana Kondisi Myanmar Sekarang?* From cnnindonesia.com: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230201135630-106-907594/2-tahun-junta-militer-berkuasa-bagaimana-kondisi-myanmar-sekarang

Constantinou, C. M., & Sharp, P. (2016). *Theoretical Perspectives in Diplomacy*. SAGE.

Convention, V. (2005). Vienna Convention on The Law of Treaties 1969. *Treaty Series*, 1-31.

CRPH. (2024, March 1). *The Comitte Representing Pyidaungsu Hluttaw*. From crphmyanmar.org: https://crphmyanmar.org/

ExportHub. (2020). *Digitalisasi Adalah Proses yang Penting di Zaman Ini! Mengapa?* From ExportHub.id.com: https://www.exporthub.id/digitalisasi-adalah-proses-yang-penting-di-zaman-ini-mengapa/

Faddilah, A. A., & Prasetya, M. N. (2022). Peran Indonesia dalam Proses Demokrasi Myanmar melalui Investasi. *Jurnal Mahasiswa*, Medan.

Faustine, C. J., Cayetha, G. A., Kurniawan, M., Suhairy, N., K, V. A., & A, D. S. (2021). Mengukur Efektivitas Preventive Diplomacy Indonesia Di ASEAN dalam Menanggapi Konflik Kudeta Militer Myanmar 2021. *Jurnal Sentris*

Khusus Diplomasi, 9-17.

Forester, J. (1997). *Planning in The Face of Power*. London: University of California Press.

Giles, C. (2021, February 2). *Kudeta Myanmar: Bagaimana cara militer mengacaukan internet ketika mengambil alih kekuasaan?* From BBCNewsIndonesia.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55897797

Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of Data Collection in Qualitative Research: Interview and Focus Groups. *British Dental Journal*, 291.

Gottardi, P., & Mezzetti, C. (2024). Shuttle diplomacy. *Journal of Economic Theory*, 1.

Gray, P. S., Williamson, J. B., Karp, D. A., & Dalphin, J. R. (2007). *The Research Imagination: an Introduction to Qualitative and Quantitative Methods.* New York: Cambridge University Press.

Kemlu. (2018). *Hubungan Bilateral Indonesia - Myanmar*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/yangon/id/read/hubungan-bilateral-indonesia-myanmar/1743/etc-menu

Kemlu. (2019, 3 31). *Momen Penting dalam Sejarah Diplomasi Indonesia*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/47/tentang_kami/momen-penting-dalam-sejarah-diplomasi-indonesia

Kemlu. (2020, June 26). *Indonesia Selamatkan dan Berikan Bantuan Kemanusiaan Kepada 99 Orang Migran Etnis Rohingya*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/1417/berita/indonesia-selamatkan-dan-berikan-bantuan-kemanusiaan-kepada-99-orang-migran-etnis-rohingya

Kemlu. (2021, February 19). *Kunjungan Menlu RI ke Brunei Darussalam*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/news/11206/kunjungan-menlu-ri-ke-brunei-darussalam

Kemlu. (2021, March 26). *Menlu Indonesia-Singapura Bahas Kerja Sama Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi 26 Maret 2021*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/i/read/2292/view/menlu-indonesia-singapura-bahas-kerja-sama-pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi-26-maret-2021

Kemlu. (2021, February 24). *Press Briefing Menteri Luar Negeri Mengenai Hasil Kunjungan ke Bangkok, 24 Februari 2021*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/2192/berita/press-briefing-menteri-luar-negeri-mengenai-hasil-kunjungan-ke-bangkok-24-februari-2021

Kemlu. (2021, February 3). *Rencana Kunjungan Resmi Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia Pada 4-5 Februari 2021*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/2131/siaran_pers/rencana-kunjungan-resmi-perdana-menteri-malaysia-ke-indonesia-pada-4-5-februari-2021

Kemlu. (2022, November 13). *Press Briefing Rangkaian KTT Asean Entry Briefing 13 November 2022*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/

4190/siaran_pers/press-briefing-rangkaian-ktt-asean-entry-briefing-13-november-2022

Kemlu. (2022). *What is BDF*. From bdf.kemlu.go.id: https://bdf.kemlu.go.id/what-is-bdf

Kemlu. (2023, July 7). *Press Briefing Menlu RI Persiapan Pertemuan ke-56 AMM/PMC 7 Juli 2023*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/ide/read/4912/siaran_pers/press-briefing-menlu-ri-persiapan-pertemuan-ke-56-ammpmc-7-juli-2023

Kemlu. (2023, December 17). *Transkrip Press Briefing Menlu RI KTT Perayaan 50 Tahun Asean-Jepang, Tokyo, Jepang 17 Desember 2023*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/5623/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menlu-ri-ktt-perayaan-50-tahun-asean-jepang-tokyo-jepang-17-desember-2023

Kemlu. (2023, April 5). *Transkrip Press Briefing Menlu RI Triwulan Pertama Keketuaan ASEAN 2023*. From kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/4600/siaran_pers/transkrip-press-briefing-menlu-ri-triwulan-pertama-keketuaan-asean-2023

Kwan, J. (2017). The Congress of Vienna, 1814-1815: Diplomacy, Political Culture and Sociability. *Historical Journal*, 4-60.

Lumolos, J., Noor, F., Dewi, K. H., Cahyono, H., Afadlal, Elizabeth, A., . . . Yustiningrum, E. (2007). Demokrasi Mati Suri. *Jurnal Penelitian Politik*, 5-17.

Martin, M. F., Dolven, B., & Smith, K. (2021). Coup in Burma (Myanmar): Issues for U.S. *Congressional Research Service*, 1-4.

Matthews, B., & Ross, L. (2010). *Research Methods A Practical Guide for The Social Sciences.* Harlow: Pearson Education Limited.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis.* London: Sage Publications.

Nau, N. U., Jekaisa, H., & Priscilla, S. N. (2023). Peran ASEAN dalam Krisis Kemanusiaan Pasca Kudeta Militer Myanmar Selama Covid-19. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol. 5, No. 1*, 63-76.

Netblocks. (2021, January 31). *Internet Disrupted in Myanmar Amid Apparent Military Uprising*. From Netblocks.com: https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-myanmar-amid-apparent-military-uprising-JBZrmlB6

Nugroho, A. S. (2016). Soekarno dan Diplomasi Indonesia. *Jurnal Sejarah dan Budaya,* 125-131.

Ramadhani, Z., & Mabrubah. (2021). Pengaruh Prinsip Non Intervensi ASEAN Terhadap Upaya Negosiasi Indonesia dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. 15-17.

Setiawan, A. (2016). *Teori dan Praktek Diplomasi.* Jakarta: UMJ.

Setkab. (2014, 11 12). From Bertemu Thein Sein, Presiden Jokowi: Indonesia Tetap Menjadi Sahabat Myanmar: https://setkab.go.id/bertemu-thein-sein-

presiden-jokowi-indonesia-tetap-menjadi-sahabat-myanmar/

Setkab. (2017, September 7). *Rakhine States dan Harkat Kemanusiaan yang Terusik*. From setkab.go.id: https://setkab.go.id/rakhine-state-dan-harkat-kemanusiaan-yang-terusik/

Setkab. (2021, April 24). *ASEAN Leaders' Meeting 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN Provinsi DKI Jakarta*. From setkab.go.id: https://setkab.go.id /asean-leaders-meeting-24-april-2021-di-sekretariat-asean-provinsi-dki-jakarta/

Setkab. (2021, February 5). *Pernyataan Pers Bersama Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia, 5 Februari 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta*. From setkab.go.id: https://setkab.go.id/pernyataan-pers-bersama-presiden-republik-indonesia-dan-perdana-menteri-malaysia-5-februari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/

Setkab. (2022, July 22). *Presiden Jokowi Akan Kunjungi Cina, Jepang, dan Korea Selatan*. From setkab.go.id: https://setkab.go.id/presiden-jokowi-akan-kunjungi-cina-jepang-dan-korea-selatan/

Setkab. (2023, May 8). *Serukan Penghentian Kekerasan di Myanmar, Presiden: Mari Cari Solusi Bersama*. From setkab.go.id: https://setkab.go.id/serukan-penghentian-kekerasan-di-myanmar-presiden-mari-cari-solusi-bersama/

SetnasAsean. (2021, February 18). *Bertemu Menlu RI, Menlu Singapura Ikut Desak ASEAN Bahas Myanmar*. From setnasasean.id: https://setnasasean.id/news /read/bertemu-menlu-ri-menlu-singapura-ikut-desak-asean-bahas-myanmar

Shedrach, I. C. (2019). Shuttle Diplomacy as an Instrument of Resolving Conflict and Redeeming the Image of the States in International Relations. *Nigerian Political Science Association*, 431.

Shenchun, Y., & Yanjun, G. (2020). *Preventive Diplomacy in The Asia-Pacific.* China: World Scientific Publishing Company.

Simanjuntak, T. R. (2023). Diplomasi Maraton Indonesia Terhadap Isu Rakhine State. *Bhuvana: Journal of Global Studies*, 62-64.

Sundhaussen, U. (1995). Indonesia's New Order: A Model for Myanmar. *The Regents of The University of California*, 768-780.

TNIAU. (2018, March 23). *Mengenang Pesawat Dakota RI-001 Seulawah*. From tni-au.mil.id: https://tni-au.mil.id/mengenang-pesawat-dakota-ri-001-seulawah/

Toer, K. S., Toer, P. A., Kamil, E., & Benedanto, P. (1999). *Kronik Revolusi Indonesia Jilid II (1946).* Banten: Kepustakaan Populer Gramedia.

VOA. (2011, May 5). *Pemimpin Burma Berkunjung ke Indonesia*. From voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/pemimpin-birma-berkunjung-ke-indonesia-121360094/92923.html

VOA. (2022, July 22). *Presiden Jokowi akan Kunjungi China, Jepang dan Korea Selatan*. From voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com

/a/presiden-jokowi-akan-kunjungi-china-jepang-dan-korea-selatan/6667875.html

VOA. (2023, May 5). *Indonesia Gunakan 'Diplomasi Diam-diam' untuk Bantu Selesaikan Krisis Myanmar*. From voaIndonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-gunakan-diplomasi-diam-diam-untuk-bantu-selesaikan-krisis-myanmar/7080071.html

VOA. (2023, June 20). *Kemlu RI: Konsensus Lima Poin Harus Jadi Pedoman Utama ASEAN untuk Bantu Myanmar*. From voaindonesia.com: https://www.voaindonesia.com/a/kemlu-ri-konsensus-lima-poin-harus-jadi-pedoman-utama-asean-untuk-bantu-myanmar/7144502.html

Widodo, P., Iswati, Zatullah, N., Hidayah, A. N., Manik, K. U., Masdar, A. M., . . . Sukendro, A. (2022). Myanmar Military Coup: Roots of Conflict and Alternative to Conflict Resolution from Indonesia as a Member of Asean. *Social Science Journal*, 1708-1717.

WorldBank. (2023, January 30). *Myanmar Economic Monitor January 2023: Navigating uncertainty*. From worldbank.org: https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-january-2023-navigating-uncertainty

Yasa, K. P. (2022). Analisis Kudeta Militer Myamnar terhadap Pemerintahan Sipil. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 104-105.

Yeremia, A. E. (2020). Sukarno and Colonialism: An Analysis of Indonesia's Foreign Policy Discourse, 1955-1961. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 1-18.